

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Drs. Sarman, Prof.Moh. Taufik, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Jakarta: RinekaCipta,2011

Inu Kencana S, Sistem Pemerintahan Indonesia, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002

Kaelan, MS, Pendidikan Pancasila, Yogyakarta : Penerbit Paradigma, 2014

Prof. Dr. M. Ryaas Rasyid, Arah Baru Otonomi Daerah di Indonesia, (Malang: Universitas Muhammadiyah), 2005

Sam M.Chan dan Tuti T.Sam, Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007

Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika,2005

Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, Raja Grafindo Persada, Jakarta,2004

Suteki dan Taufani,Galang. Metodelogi Penelitian Hukum. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018

PERATURAN-PERATURAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Inovasi Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 66 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Provinsi Riau

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Riau

Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau

JURNAL

<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/13730/13284>

Johannes. 2016. Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Menengah Atas. Semarang: Universitas Diponegoro. Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016. Diunduh pada November 16, 2018.

<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/16080/15520>

Shinta F R. 2017. Pengalihan Kewenangan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Dari Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Provinsi: (Studi Kasus Persiapan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah). Semarang:

Universitas Diponegoro. Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017. Diunduh pada November 16, 2018.

<http://repository.umrah.ac.id/457/1/jurnal%20ilmiah.pdf> Mira. 2018. Proses Peralihan Kewenangan Penyelenggaraan Urusan Pendidikan Menengah dari Kabupaten Bintan kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Studi Kasus Persiapan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau). Tanjungpinang: Universitas Maritim Raja Ali Haji. Diunduh pada Januari 21, 2019.

<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/22789/20837> Intan. 2018. Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/Puu-Xiv/2016 Terhadap Desentralisasi Pendidikan di Kabupaten Tegal. Semarang: Universitas Diponegoro. Volume 7, Nomor 3, Tahun 2018. Diunduh pada Februari 27, 2019.

<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/19619/18610> Muhammad Zikri. 2017. Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Oleh Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Riau dalam Pengawasan Perikanan. Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017. Diunduh pada Februari 27, 2019.

<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/15674/15156> Viesy. 2017. Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Dinas Kelautan dan Perikanan di bidang Urusan Pemerintahan Menurut Undang -Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah di Kota Bengkulu. Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017. Diunduh pada Februari 27, 2019.

<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/13306/12863> Muhammad Andi. 2016. Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Inspektorat Daerah dalam Rangka Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Semarang. Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016. Diunduh pada Februari 27, 2019.

INTERNET

E-JURNAL. "Pengertian Mutu Pendidikan". 2016.
<https://www.e-jurnal.com/2014/02/pengertian-mutu-pendidikan.html>
Diunduh pada November 15, 2018

Website Pendidikan Terbaru. " Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pendidikan". 2013.
<https://www.websitependidikan.com/2016/03/tugas-dan-fungsi-dinas-pendidikan.html> Diunduh pada November 15, 2018.

- Wikipedia. “Pemerintah Daerah Di Indonesia”. [https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah daerah di Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_daerah_di_Indonesia) Diunduh pada November 15, 2018
- Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah. “Pengumuman Hasil Akreditasi Tahun 2018”. 2018.
<https://bansm.kemdikbud.go.id/pengumuman/read/pengumuman-hasil-akreditasi-tahun-2018> Diunduh pada November 28, 2018
- Wikipedia. “Sejarah Riau”. [https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah Riau](https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Riau) Diunduh pada Januari 18, 2019.
- Dinas Pendidikan Provinsi Riau. “Perubahan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Riau 2014-2019”. <http://disdik.riau.go.id/Revisirenstra2014-2019> Diunduh pada Januari 21, 2019.
- LPMP Riau. “Tugas dan Fungsi LPMP Riau”. 2017.
<http://lmppriaui.kemendikbud.go.id/?p=2395> Diunduh pada Januari 23, 2019.
- LPMP Riau. “Visi, Misi dan Tujuan Strategis LPMP Riau”. 2017.
<http://lmppriaui.kemendikbud.go.id/?p=2397> Diunduh pada Januari 23, 2019.
- Dinas Pendidikan Provinsi Riau. “Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Dinas Pendidikan)”. 2017.
<http://disdik.riau.go.id/LAPORANKINERJAINSTANSIPEMERINTAHANTAHUN%202017.pdf> Diunduh pada Januari 23, 2019.